

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, kemudian Indonesia pun berganti sistem kedaulatan dan dibentuklah sistem kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia dengan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pergantian sistem kedaulatan dan dasar negara yang terjadi pada Indonesia pun mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahannya. Negara Indonesia selanjutnya menganut suatu demokrasi yang disebut dengan masa Demokrasi Liberal dan sistem pemerintahannya adalah Parlementer (Thoha, 2005, hlm. 123).

Masa pemerintahan parlementer ditandai dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan Presiden dan Wakil Presiden hanya sebagai kepala negara tanpa memiliki kekuasaan yang efektif (Suwirta, 2008, hlm. 48). Dalam kabinet parlementer kekuasaan tertinggi berada ditangan Perdana Menteri dan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara sehingga yang bertanggung jawab terhadap Parlemen yaitu Perdana Menteri bersama dengan para Menteri. Lalu, salah satu ciri dari masa Demokrasi Liberal di Indonesia adalah sering bergantinya kabinet yang memerintah dan sistem multipartai. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).

Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (umumnya ketua partai) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden. Suatu kabinet dapat berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari parlemen, dengan kata lain ia memperoleh mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota parlemen kurang setuju ia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet. Maka pada periode tahun 1950 Indonesia sebenarnya mengalami krisis dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan

keamanan negara. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (1950-1959) Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer.

Tujuh kabinet pun berganti-ganti duduk dan menjabat dalam negara, sehingga rata-rata masa jabatan satu kabinet hanya seumur jagung, setiap kabinet menjabat hanya berkisar satu setengah tahun. Program-program yang dicanangkan oleh kabinet yang menjabat pada saat itu umumnya tidak dapat diselesaikan. Mosi yang diajukan untuk menjatuhkan kabinet lebih mengutamakan merebut kedudukan partai daripada menyelamatkan rakyat. Sementara para elit politik sibuk dengan kursi kekuasaan, rakyat mengalami kesulitan karena adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya perekonomian yang menimbulkan labilnya keadaan sosial-ekonomi, perubahan-perubahan kabinet yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal mengakibatkan keadaan pemerintahan menjadi tidak stabil (Maarif, 1996, hlm. 198).

Tak terkecuali pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo, kabinet ini pun harus merasakan panasnya kursi kabinet. Dari tujuh kabinet pernah menjabat pada masa Demokrasi Parlementer, Ali Sastroamidjojo merasakan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 kali. Masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dilaksanakan pada tahun 1953-1955 atau juga lebih disebut dengan Kabinet Ali-Wongso dengan program kerja diantaranya Program kabinet Ali Sastroamidjojo I menjadi prioritas adalah mengenai keamanan dalam negeri (*Antara*, 14 Januari 1955, hlm. 3). Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikatakan belum berhasil, karena pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I belum bisa menghentikan aksi pergolakan yang dilakukan oleh DI/TII yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia yang hidup di desa-desa menjadi ketakutan dan memberikan dampak yaitu penurunan dan merosotnya produksi pertanian (Sundhaussen, 1998, hlm. 43). Ali Sastroamidjojo menjabat kembali menjadi Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya yaitu pada tahun 1956 hal ini didasari karena pada Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum 1955. Lalu Kabinet Ali Sastroamidjojo II terbentuk atas koalisi Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Perti. Sehingga koalisi ini

menguasai 179 suara dalam DPR yang beranggotakan 257 orang. Jadi itu berarti bahwa kabinet menguasai suara mayoritas dalam DPR.

Kabinet dapat terbentuk dengan memiliki komposisi yang merupakan gabungan koalisi antara Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi dan NU ini terbentuk pada tanggal 20 Maret 1956 dan mempunyai program kerja antara lain adalah pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB), memperjuangkan kembali Irian Barat ke pangkuan Indonesia, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika (Hakiki, 2014, hlm. 10).

Itulah sebabnya pada tanggal 5 April 1956 pemerintah bisa mengajukan Rencana Undang-Undang pembatalan KMB secara unilateral, baik formal maupun materil disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 3 Mei 1956. Koalisi Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalami pelemahan, dengan keluarnya Masyumi dari koalisi. Alasan keluarnya Masyumi adalah karena Pemerintahan Ali Sastroamidjojo II tidak mampu menyelesaikan peristiwa di Sumatera Barat dan berpendirian lain tentang penyelesaian bekas milik-milik Belanda berdasarkan hasil pembatalan KMB (Herliswanny, 1989, hlm. 93).

Sama seperti pada saat Ali Sastroamidjojo menjabat pertama kali program kerja yang bisa dikatakan sukses adalah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 3 Mei 1956. Dalam melaksanakan program kerja yang lainnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalami kesulitan diantaranya adalah penentangan dan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Selain itu, kabinet ini mendapatkan hambatan lain yaitu sulit untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang mengalami krisis.

Setiap program kerja didalam pemerintahan tak jarang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak baik oposisi dari pemerintah tersebut maupun golongan masyarakat sipil biasa. Sehingga setiap pemerintahan tak lepas dari kritik yang ditujukan untuk pemerintahan dan diharapkan menjadi lebih baik dari pemerintah-pemerintah sebelumnya baik kritik yang membangun maupun kritik yang menjatuhkan. Tak terlepas dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Pada dekade 1950 kritik yang disampaikan terhadap pemerintahan biasanya melalui surat kabar atau

pers yang pada saat itu merupakan media yang digemari oleh masyarakat dalam menyampaikan kondisi Indonesia dan sudah banyak Pers yang terbit. Pers ini terbagi menjadi dua golongan yaitu Pers Independen dan Pers Partisipan.

Pers Partisipan sendiri merupakan organ media yang dimiliki oleh suatu partai politik. Banyaknya media pers Partisipan maupun Independen yang terbit pada tahun 1950 ini diakibatkan oleh kebebasan para wartawan untuk menerbitkan pers. Boleh dikatakan bahwa siapapun yang memiliki modal, berupa uang, tidak peduli berasal dari golongan manapun atau menganut aliran dan ideologi politik apapun, dengan tanpa memerlukan izin dari siapapun dapat menerbitkan pers, khususnya surat kabar. Sehingga pers Nasional Indonesia disini mulai mendapatkan kebebasan dalam menyebarkan berita, bahkan pada masa ini pemerintah Indonesia pun memberikan bantuan modal, subsidi kertas koran dan alat-alat cetak (Suwirta, 2008, hlm. 49). Kritik yang disampaikan biasanya terdapat pada dalam kolom Tajuk Rencana, Catatan Pojok, maupun Karikatur yang dimuat dalam surat kabar tersebut. Salah satu surat kabar yang gemar menyampaikan kritik terhadap pemerintah pada era 1950 adalah surat kabar *Indonesia Raya*, *Merdeka*, *Pedoman*, dll.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengemukakan pandangan dari Pers Partisipan yaitu pers yang terikat atau berafiliasi dengan suatu kekuatan politik, baik berafiliasi dengan partai, badan pemerintahan, suatu kelompok, dll. Pers ini menjamur tahun 1955 tepatnya menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum pertama di Indonesia, ada beberapa golongan Pers Partisipan yang bahkan sudah terbit sebelum tahun 1955. Pers Partisipan tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk menarik minat dan simpati masyarakat agar memilih partai politik dan tokoh-tokoh yang bertarung saat itu untuk mendapatkan dan mewujudkan kekuasaan khususnya didalam tubuh DPR dan Konstituante.

Partai-partai yang pada saat itu telah memiliki surat kabar Partisipan diantaranya empat partai besar yang ada di Indonesia yaitu partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan organ media resminya yaitu *Harian Abadi*, Partai Nasional Indonesia dengan media resminya *Suluh Indonesia*, NU dengan media resminya *Duta Masyarakat*, dan Partai Komunis Indonesia yang memiliki organ resmi yaitu *Harian Rakyat*. Akibat dari pers yang sudah menjamur dan berkembang pesat ini, ada beberapa Pers yang masih terbit dan ada pula pers yang

tidak mampu bersaing sehingga mengakibatkan penutupan penerbitan pers akibat tidak ada batasan dalam pengeluaran surat kabar pada masa itu. Kemudian menjelang Pemilihan umum 1955, Pers pada fase ini sudah dikatakan melebihi batas kesopanan karena kebebasan pers disini ditujukan untuk saling mencaci dan saling memfitnah lawan politiknya. Hal ini ditujukan agar lawan politiknya tersebut jatuh nama dan citranya didalam pandangan masyarakat. Selain itu, ketika masa-masa kampanye Pemilihan Umum 1955 para partai politik memanfaatkan pers sebagai alat propaganda mereka.

Salah satu Pers Partisipan yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini yaitu surat kabar milik Partai Nasional Indonesia yaitu surat kabar *Suluh Indonesia*. Awal mula surat kabar ini berdiri dikisahkan oleh Satyagraha. Menjelang Pemilihan Umum 1955, partai – partai politik mulai bersiap terutama dalam melakukan agitasi – propaganda. Hampir semua partai besar di masa itu telah memiliki surat kabar yang mendukung. Seperti Masyumi dengan surat kabarnya yaitu koran *Abadi*, Partai Sosialis Indonesia (PSI) didukung oleh *Pedoman* yang dipimpin oleh wartawan kawakan Rosihan Anwar, Partai Komunis Indonesia memiliki surat kabar *Harian Rakyat*, bahkan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) menerbitkan surat kabar *Pemandangan*.

Hanya Partai Nasional Indonesia yang belum memiliki media resmi, harian *Merdeka* yang dipimpin oleh B.M. Diah merupakan satu–satunya media yang mewakili pandangan dari Partai Nasional Indonesia dan juga sebagai simpatisan partai tersebut, namun kebijakan redaksionalnya tidak harus selalu sejalan dengan garis Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1953 akhirnya Partai Nasional Indonesia memiliki organ media resmi dan diberi nama *Suluh Indonesia* atau biasa disingkat *Sulindo*. Nama *Suluh Indonesia* berasal dari nama organ Partai Nasional Indonesia yaitu *Suluh Indonesia Muda*. Mohammad Tabrani merupakan pendiri pertama dari surat kabar ini dan Redaktornya pertamanya adalah Sayuti Melik, kemudian digantikan oleh Manai Sophian pada pertengahan Desember 1953 (Rocamora, 1991, hlm. 119). Surat kabar *Suluh Indonesia* ini terbit dari hari Senin sampai Sabtu, sementara pada hari Minggu surat kabar ini tidak terbit. Surat kabar ini memiliki slogan ‘Untuk Kesatuan Rakyat dan Bangsa’ yang selalu ditampilkan ketika terbit dibawah nama surat kabar *Suluh Indonesia* ini.

Sebagai surat kabar Partisipan dari Partai Nasional Indonesia, *Suluh Indonesia* selalu membela apapun yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia dan selalu mencela dan mengkritik apapun yang dilakukan oleh para lawan politiknya. Tak terkecuali ketika kabinet Ali Sastroamidjojo II surat kabar ini selalu pro dalam menerbitkan pemberitaan dengan apa yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo, hal ini disebabkan Ali Sastroamidjojo merupakan anggota dari Partai Nasional Indonesia sehingga selalu dibela dan digambarkan dengan citra yang baik oleh surat kabar ini walaupun menimbulkan pro dan kontra.

Kepercayaan diri yang dimiliki oleh *Suluh Indonesia* ini disebabkan karena faktor Partai Nasional Indonesia merasa menjadi partai politik yang terkuat karena saingannya yaitu partai Masyumi telah mengalami perpecahan didalam internalnya dan kemudian terpecah hingga akhirnya mendirikan partai sendiri yaitu NU. Kemudian, faktor Presiden Soekarno terhadap Partai Nasional Indonesia ini. Meskipun Soekarno telah melepaskan keanggotaannya di Partai Nasional Indonesia namun simpatinya terhadap partai tersebut tidak dapat dirahasiakan (Sunarto, 2005, hlm. 198). Faktor-faktor tersebutlah yang membuat surat kabar *Suluh Indonesia* ini semakin berani dalam menentang lawan politiknya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menerbitkan pemberitaannya.

Selain Pers Partisipan, terdapat juga Pers Independen pada dekade ini, pengeritan dari Pers Independen adalah sebuah pers yang tidak terikat dengan suatu kekuatan politik manapun dan menerbitkan pemberitaan sesuai dengan arahan dan idealis pemimpin redaksinya. Surat kabar Independen yang akan penulis kaji ialah surat kabar *Indonesia Raya* karena menurut penulis melihat dari *background* surat kabar ini merupakan surat kabar yang tidak berafiliasi dan tidak terikat dengan golongan politik manapun, menyajikan berita yang lugas, kritis dan netral, memiliki pendirian merdeka dan menghindarkan diri dari pemberitaan politik yang berat sebelah, menguntungkan salah satu golongan dan merugikan golongan lain. Namun dalam mengabarkan pemberitaan harus sesuai dengan ide, pikiran, dan idealisme para pemimpin redaksinya. Penulis ingin mencoba melihat bagaimana kritik dari surat kabar ini apakah memang benar-benar Independen atau mungkin bisa diragukan ke-Independen-annya tersebut sehingga bisa jadi surat kabar ini mengkritik pemerintahan atas dasar memihak pada suatu golongan politik tertentu

bukan benar-benar ingin mengkritik untuk membangun dan netral dalam pemberitaannya.

Surat kabar *Indonesia Raya* pertama kali terbit pada tanggal 29 Desember 1949, Awal pendirian surat kabar *Indonesia Raya* terdapat campur tangan pihak militer dalam surat kabar yang dipimpin oleh Mochtar Lubis ini. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara Mochtar Lubis dan Bachtiar Lubis yang tidak lain merupakan kakaknya sendiri. Bachtiar Lubis merupakan seseorang yang memiliki jabatan penting didalam militer dan mempunyai dukungan dari TNI terutama Divisi Siliwangi (Hill, 2011, hlm. 46). Namun, keterlibatan pihak militer tidak banyak mempengaruhi surat kabar ini untuk berpihak pada suatu kekuatan dan golongan politik karena dalam terbitan ini tergabung wartawan-wartawan yang memiliki pendirian merdeka dan menghindarkan diri dari pemberitaan politik yang berat sebelah, menguntungkan salah satu golongan dan merugikan golongan lain.

Surat kabar ini sangat vokal dalam mengkritik pemerintah pada periode 1950, terlebih kritik-kritik tersebut ditulis sendiri oleh Mochtar Lubis dan ditulis dalam tajuk-tajuk surat kabar *Indonesia Raya* ini. Dalam tajuk-tajuk rencana yang ditulis Mochtar Lubis mencantumkan namanya sendiri untuk mempermudah pelacakan dan merupakan sebuah tanda bahwa apa yang terdapat dalam tajuk-tajuk tersebut adalah pendapat pribadinya. Tajuk-tajuk yang ditulis Mochtar Lubis seringkali berisikan suatu kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangannya (Atmakusumah, 1997, hlm. 14). Karena keras dan pedasnya kritik yang dilontarkan oleh surat kabar ini, *Indonesia Raya* dan Mochtar Lubis mendapat sebutan Wartawan Jihad didasari oleh keberaniannya dalam mengkritik pemerintahan.

Siapapun pemerintah yang menjabat dan berasal dari golongan manapun surat kabar ini selalu mengkritik tak terkecuali dengan kabinet Ali Sastroamidjojo II pun mendapatkan kritik dari surat kabar ini. Kritik yang dilontarkan pun melalui pemberitaan surat kabar *Indonesia Raya* ini dan dimuat pada Catatan Pojok, Tajuk Rencana atau Karikturnya. Terlebih dengan surat kabar *Suluh Indonesia*, karena dua surat kabar ini berasal dari dua golongan dan karakteristik yang berbeda maka ada subjektifitas ketika menerbitkan pemberitaannya selain itu ada pertentangan dari dua surat kabar *Indonesia Raya* dan *Suluh Indonesia* yang sangat bertolak

belakang dalam menerbitkan pemberitaan khususnya terhadap kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Kemudian masalah yang menurut penulis menarik untuk membahas mengenai judul penelitian ini yaitu penulis ingin melihat bagaimana karakteristik pemberitaan dari dua surat kabar yang berasal dari golongan yang berbeda dan saling bertentangan tersebut, kemudian kabinet Ali Sastroamidjojo II menurut penulis dinilai memiliki visi-misi dan program kerja yang jelas dalam artian pemerintahan memiliki program kerja yang dapat mensejahterakan rakyat dan membuat negara Indonesia dapat berkembang, namun dari sisi lain terdapat pemberitaan dan kejadian-kejadian yang dinilai kurang sesuai dan juga kurang relevan dengan kondisi yang diharapkan saat menjalankan program kerja yang direncanakan. Selain itu pemberitaan media dinilai kurang bersifat netral karena adanya penyokong dana dari beberapa pihak sehingga kabar yang diberitakan dirasa berat sebelah dan juga menjatuhkan pihak lainnya. Sehingga perlu adanya perbandingan dari surat kabar tersebut untuk membuktikan adanya keberpihakan diantara dua surat kabar tersebut. Selain pemaparan tersebut, penulis pun tertarik untuk membahas mengenai surat kabar pada masa Demokrasi Liberal karena kebanyakan penelitian yang memiliki tema serupa biasanya hanya membahas mengenai keadaan dan situasi politik, ekonomi, dan sosial pada masa ini dan sangat jarang yang membahas mengenai keadaan dan dinamika pers pada masa Demokrasi Liberal ini. Penulis berharap agar kajian ini menjadi salah satu pelengkap dan pemicu agar kedepannya semakin banyak penelitian yang membahas mengenai peranan pers di Indonesia khususnya pada masa Demokrasi Liberal. Beberapa hal diatas menarik minat penulis untuk mengkaji dan mengungkapkan mengenai peranan Pers di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Perbandingan Pandangan Surat Kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun fokus permasalahan penelitian ini adalah “*Bagaimana Pandangan Pers Nasional Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II?*” Sementara untuk mengarahkan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ?
2. Bagaimana pemberitaan surat kabar *Suluh Indonesia* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ?
3. Bagaimana pemberitaan surat kabar *Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ?
4. Bagaimana perbandingan Pemberitaan (*News*) dan Pandangan (*Views*) dari surat kabar *Suluh Indonesia dan Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat tujuan diadakannya penelitian yang berjudul “Perbandingan Pandangan Surat Kabar *Suluh Indonesia dan Indonesia Raya* Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957” sebagai berikut :

1. Menjelaskan kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II
2. Mengidentifikasi pemberitaan surat kabar *Suluh Indonesia* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II
3. Mengidentifikasi pemberitaan surat kabar *Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II
4. Menganalisis perbandingan Pemberitaan (*News*) dan Pandangan (*Views*) surat kabar *Suluh Indonesia dan Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, penulis mengharapkan penulisan karya ilmiah yang akan penulis teliti dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis
 1. Memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia
 2. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis
 3. Menambah wawasan materi sejarah dalam dunia pendidikan di Indonesia
- b. Manfaat Teoritis
 1. Mengembangkan penelitian Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia khususnya mengenai surat kabar *Suluh Indonesia dan Indonesia Raya*
 2. Menambah pengetahuan Sejarah Demokrasi Liberal
 3. Menambah pengetahuan baru mengenai Peranan dan Pandangan Pers di Indonesia khususnya pada masa Demokrasi Liberal
- c. Manfaat Pendidikan
 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu materi ajar dalam dunia pendidikan tingkat SMA Kelas XII (Wajib) dengan mengacu pada kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.
 2. Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan salah satu sumber dalam penelitian – penelitian selanjutnya.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi yang akan ditulis disusun dengan sistematika berikut ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang penelitian penulis yang mengambil judul “Perbandingan Pandangan Surat Kabar *Suluh Indonesia dan Indonesia Raya* Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957”, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan tersebut diuraikan guna mempermudah penulis untuk menganalisisnya di bab IV.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini akan berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil penulis, penelitian-penelitian terdahulu yang juga relevan, dan teori penelitian berkenaan dengan masalah yang diteliti. Literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian juga akan diuraikan di dalam bab ini. Tinjauan sumber tersebut dilakukan guna mempermudah penulis dalam memetakan bagian-bagian bahasan dalam bab IV.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dan menguraikan metode serta teknik yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian mengenai “Perbandingan Pandangan Surat Kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957”.

Bab IV Temuan dan Pembahasan mengenai Pandangan dan Pemberitaan *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957. Bab ini merupakan bagian inti atau utama pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Bab ini juga akan menjawab beberapa rumusan pertanyaan yang dipaparkan pada bab I. Kemudian bab IV juga memiliki hubungan dengan bab sebelumnya menyangkut rancangan kajian pustaka, metode penelitian yang telah di tentukan. Karena untuk menjawab rumusan masalah, penting untuk memperhatikan kajian pustaka serta metode yang akan digunakan.

Bab V Simpulan dan Saran. Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis penulis yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini juga penulis memaparkan hasil analisis pada pembahasan yang dijelaskan pada bab IV yang menggambarkan pandangan surat kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956-1957. Bab ini juga akan menyertakan rekomendasi-rekomendasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan mengambil tema yang sama.